

## **Agama Dan Perubahan Sosial, Sebuah Tanggapan *Pudarnya Kauman***

Maulana Kurnia Putra

Berpikir tentang perubahan sosial mau tidak mau melakukan telisik sejarah. Sejarah yang dibangun dari waktu ke waktu tanpa ada pemberhentian gerak peradaban. Pesatnya laju perubahan telah menjungkirbalikkan tatanan masyarakat yang diterabasnya, entah dengan teknologi, ide, gagasan, politik, dan lain-lain.

Gagasan tentang rasionalisasi yang dibawa dalam sejarah panjang kolonialisasi hingga kini berujung pada modernisme nilai-nilai dalam masyarakat berakibat pada bayang-bayang agama dan budaya yang semakin memudar. Buku *Pudarnya Kauman* (2011) yang dituliskan Akhmad Ramdhon mencoba untuk menceritakan narasi perubahan yang ada di Kelurahan Kauman, Kota Surakarta berdasar telisik sejarah, sosial, politik, ekonomi, dan agama.

Gerak perubahan berawal dari gerak interaksi. Interaksi melalui hubungan superior-inferioritas dalam masyarakat. Dapat dilihat dari studi tentang interaksi kekuasaan Jawa pada masa Hindu-Budha, Islam, dan kolonial. Hindu-Budha memberikan sebuah bangunan struktur masyarakat Jawa pada era Majapahit, lalu Islam yang datang dengan barang dagangannya di daerah pesisir pulau Jawa. Kolonialpun bergerak hampir serupa. Kita dapat menilik semangat pergerakan Hindu-Budha, Islam, dan kolonial melalui kontestasi kekuasaan, antara Demak dan Majapahit, Demak dan Portugis, Mataram dan kolonial, hingga saling berebut pasar.

Sejarah Surakarta memang dibentuk dari akulturasi budaya, Kraton Kasunanan yang berideologi Islam bersandar Hindu-Budha berpolitik Eropa. Gerak kolonialisasi telah membentur dan mendobrak semangat tradisi untuk tetap bertahan dan bertumbuh (glokalisasi). Tradisionalisme yang konon bersandar pada agama mulai dipertanyakan dalam gerak perubahan sosial. Seolah-olah gerak

modernisasi itu adalah *Godzilla* yang tidak dapat dibendung atau *Jogernaut* yang tidak tertandingi kemabukannya.

Agama sepertinya berhenti pada persimpangan jalan, berdiri di lampu pengatur lalu lintas karena bingung tidak dapat membedakan warna tiga buah lampu dan tidak paham membaca rambu jalan. Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah menuliskan dalam *Pesantren* pada akhir tahun 80-an tentang "*Umat Islam Seribu Tahun Berhenti Berpikir*". Keberpulangan masyarakat terhadap ulama-ulama seperti yang dahulu dilakukan masyarakat Kauman misalnya, tidak dapat beriringan dengan konflik, wacana, dan konteks masyarakat yang selalu berubah, diperparah pola asuhan agama di masyarakat hanya berkisar pada "penjara teks". Rujukan tekstual ini memang ada saatnya sangat relevan dalam masyarakat, namun para Tafsir Anom tidak peka terhadap perubahan yang disebabkan politik, ekonomi, perspektif budaya, dan lain-lain.

Merujuk pada Widji Laksono dalam *Mengislamkan Tanah Jawa* (1995), Sunan Giri adalah seorang gembong dalam bidang politik di kerajaan Islam Demak. Beliau berani untuk menjadikan agama sebagai dasar politik, peraturan ketataprajaan, dan pedoman tata cara keraton yang dibantu oleh Sunan Kudus yang ahli dalam bidang hukum, bergerak dalam ranah perundang-undangan, peradilan, pengadilan, dan mahkamah. Peranan agama sebagai sandaran hukum formal yang dilakukan Sunan Giri sangat berperan dalam pendirian kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, alkisah hingga Makassar, Hitu (Ambon), dan Ternate dan seringkali diceritakan bahwa seorang raja menjadi sah kekuasaannya setelah mendapat pengakuan Sunan Giri, hingga misionaris Portugis di Maluku menyamakan kedudukan Sunan Giri dengan seorang Paus, *Khalifah* dalam perspektif Islam, atau *Ratu Tetunggul Khalifatullah* dalam perspektif wali-wali di Jawa.

Dari kisah Sunan Giri dapat direfleksikan bagaimana agama bergerak dalam bidang politik, hukum, sosial, dan keilmuan dalam persebarannya membentuk nilai-nilai acuan di masyarakat. Tafsir Anom tidak melakukan itu dalam pola pendidikan di Kauman. Pola pendidikan pesantren yang dirawati sejak dulu tidak lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dari masyarakat. Pengaruh kekuasaan

politik kolonial dalam sekejap merubahnya tanpa ada upaya antisipasi dari Tafsir Anom. Ulama tidak lagi memberikan perestuan dalam pengangkatan raja. Pemerintah kolonial setelah gerak revolusi melalui perang mengkooptasi kekuasaan tradisional yang kini memberikan pengakuan dan perestuan terhadap raja, ini dapat ditilik dari narasi dalam *The History Of Java* (2008). Dalam proses pendidikan, ini dapat dilihat konteks yang serupa yang dituliskan Solo Soemardjan dalam *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (1981), Solo menuliskan tentang peranan pesantren yang berubah karena penetrasi ilmu pengetahuan sekuler dalam kurikulum pesantren, mengurangi pendidikan keagamaan menambah ilmu pengetahuan yang dibawa pihak kolonial. Di sini peran ulama menjadi terkikis habis yang berdampak pada pelepasan pengaruh agama yang tidak lagi menjadi etos perilaku, namun hanya sekedar teks yang dibaca.

Proses modernisasi sebagai proses perubahan sosial memang memberikan dampak baru pada masyarakat, dalam berekonomi, masyarakat akan sangat dinamis dalam mobilitasnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Ini yang tidak dapat diantisipasi oleh Keraton dalam hubungan patron-kliennya dengan abdi dalem, Ulama dengan pengajaran kitab-kitabnya, hingga tata laku kraton dengan televisi. Kasus komodifikasi batik di Kampung Kauman Surakarta memberikan gambaran bagi kita untuk melihat lebih jauh tentang sejarah lokal. Dari masyarakat pengabdi, penikmat waktu, produsen, borjuase, hingga nafsu pariwisata yang diusung oleh politik kota. Politik yang dibingkai dalam industrialisasi untuk membangun jembatan emas antara penguasa politik miskin harta dengan pemilik harta miskin kekuasaan politik pada masa kontemporer.

Sekularisasi memudahkan agama di masyarakat modern. Sekularisasi tidak bertujuan untuk meniadakan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dari kasus perubahan proses pendidikan di Kauman dan Yogyakarta misalnya, berdampak pada penilaian masyarakat pada agama tidak lagi relevan untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau bahkan penilaian bahwa agama tidak mampu mengatasi *Godzilla* atau *Jogernaut* tersebut. Agama seperti dicoret dalam naskah peradaban modern, namun tetap dibiarkan ada tapi tidak berarti, ~~agama~~.

Periode Sunan Giri yang mengintegrasikan agama dan dunia profan tidak lagi berlaku dalam kultur masyarakat pascakolonialisasi. Gerak perubahan yang berangkat dari proses revolutif-fisik memberikan dampak jangka panjang yang mengambil alih narasi sejarah negara-negara dunia ketiga. Agama tidak boleh dibawa dalam lembaga politik pemerintahan, aktivitas sosial ekonomi yang semula ditata oleh norma agama terganti dengan seperangkat lembaga sosial berdasar teori yang menghiraukan ajaran agama, dengan alasan lebih ilmiah dan realis, kultur politik dan kultur tradisional yang berperspektif trasendental-immanen berganti dengan pragmatisme-temporal. Tidak aneh ketika Kauman tidak lagi mampu bertahan dibentur oleh politik kota yang kosmopolit, pragmatik, dan westernis.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, adakah alat ukur kemajuan dalam proses sejarah? Kemajuan adalah kata yang sakral, modern adalah kata yang suci, namun kesakralan dan kesuciannya dipertanyakan karena sebuah tujuan.

\*) Disampaikan dalam Bedah Buku *Pudarnya Kauman* (2011) karya Akhmad Ramdhon.

Blulukon, 15 Juli 2011

Sosiologi FISIP UNS

maulanakurnia@gmail.com